

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan adalah unsur terpenting dalam bisnis, karena merupakan penentu suatu usaha untuk berkembang atau tidak. Menurut PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas (Puspayanti & Suputra, 2018). Laporan keuangan biasanya lebih dibutuhkan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, bank, dan pemerintah sebagai alat komunikasi.

Bagi investor, laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan investasi yang mereka lakukan (Pratama & Haryanto, 2014). Bagi kreditor, laporan keuangan memberikan informasi tentang kondisi keuangan untuk melihat apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengambil tindakan dalam menjamin dan melunasi hutang kepada kreditor (Erica, 2018). Dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi debitur, bank dapat melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak (Saraswati, 2012). Bozanic *et al.*, (2016) menyatakan bahwa otoritas pajak menggunakan informasi

publik seperti laporan keuangan publikasi sebagai tambahan informasi dari laporan keuangan perusahaan yang diperoleh secara langsung. Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam mengidentifikasi hal-hal yang patut dipertanyakan pada pajak perusahaan dan potensi terjadinya *Tax Avoidance* (Nguyen, 2021).

Menurut PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan terdiri dari lima laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dari kelima laporan keuangan tersebut empat laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas sudah terstandar namun kebebasan masih ada di CALK. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa di dalam penyusunan CALK, terdapat beberapa pokok yang wajib diungkapkan dalam CALK dimana dalam PSAK tersebut juga memperbolehkan pengungkapan informasi tambahan yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Menurut Neliana (2018), pengungkapan adalah penyajian suatu informasi yang harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan sebenarnya dimana informasi tersebut harus jelas, akurat, dan terpercaya. Alfiana (2018) menyatakan bahwa pengungkapan informasi dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (Wulandari & Atmini, 2012).

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan (Wulandari & Atmini, 2012).

Dalam CALK, selain informasi angka (kuantitatif) terdapat juga informasi deskriptif (kualitatif) yang digunakan untuk memperjelas informasi kuantitatif yang ada pada empat laporan keuangan sebelumnya, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas (Hadijah & Nurfitriah, 2018). Hadijah dan Nurfitriah (2018) menyatakan bahwa bagian-bagian dalam CALK menjelaskan mengenai semua informasi yang ada di dalam empat laporan keuangan sebelumnya seperti gambaran umum perusahaan, dasar penyusunan laporan keuangan, dan informasi tambahan. Informasi tambahan meliputi informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ataupun informasi relevan lainnya yang tidak disajikan dalam empat laporan keuangan sebelumnya (pengungkapan sukarela) sehingga informasi yang diungkapkan setiap perusahaan dalam CALK akan bervariasi tergantung dari informasi yang mereka ungkapkan secara sukarela atau diluar dari informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

CALK khusus perpajakan merupakan salah satu pengungkapan lainnya (informasi tambahan) yang secara khusus membahas tentang pajak. Raedy *et al.*, (2011) menyatakan bahwa CALK khusus perpajakan merupakan salah satu bagian CALK yang paling rinci. CALK khusus perpajakan tergolong unik karena otoritas pajak dapat menggunakannya untuk membatasi *Tax Avoidance* (Inger *et al.*, 2018). Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan karena *Tax Avoidance* adalah usaha pengurangan pajak yang tetap

mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga di satu sisi *Tax Avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Dalam kasus laporan keuangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia, pernah terjadi penggelembungan laba perusahaan dimana pada laporan keuangan tersebut Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar U\$809.000 pada tahun 2018 dan laporan keuangan tahun 2018 tersebut berbanding terbalik dengan laporan keuangan tahun 2017 yang rugi U\$216,58 juta. Pada laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2018, Garuda Indonesia masih merugi sebesar U\$114,08 juta, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 ditemukan telah terjadi penggelembungan keuntungan perusahaan Garuda Indonesia. Pada laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang sebenarnya belum dibayarkan. Laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan Garuda Indonesia kepada publik merupakan laporan keuangan yang menyesatkan karena memiliki standar ganda yang tidak sesuai dengan laporan keuangan yang sesungguhnya. Penggelembungan laba bersih perusahaan Garuda Indonesia tersebut tidak sesuai dengan kenyataan kondisi finansial Garuda Indonesia sehingga terjadi pencatatan ganda pada dua laporan keuangan, yaitu kepada *intern* perusahaan dan kepada publik. Di Indonesia banyak perusahaan melakukan praktek menyimpang dengan membuat laporan keuangan ganda seperti memberikan

laporan keuangan yang berbeda untuk bank dan pajak (Mukoffi, 2019). Pelaporan keuangan ganda tersebut menyebabkan pemeriksa pajak tidak hanya berpegang kepada satu laporan saja tetapi menggunakan laporan yang diberikan oleh perusahaan dan laporan keuangan yang dipublikasikan.

CALK khusus perpajakan memuat dua jenis informasi yaitu informasi angka (kuantitatif) dan informasi deskriptif (kualitatif) (Liu, 2021). Dua jenis informasi tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Informasi yang jelas dan lengkap mengenai perpajakan dalam laporan keuangan akan membantu petugas pajak, pemerintah, investor serta kreditur untuk mengetahui kondisi perusahaan. Informasi kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran (Wantah, 2015). Informasi kualitatif merupakan informasi yang mendeskripsikan detail pajak lainnya yang tidak dijelaskan oleh informasi kuantitatif pada CALK khusus perpajakan (Inger, 2018).

Penelitian Nguyen (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *Tax Avoidance* cukup tinggi cenderung menyamarkan informasi perpajakan mereka dalam laporan keuangan dengan memberikan informasi yang cukup kompleks. Semakin banyak informasi yang diungkapkan, maka laporan keuangan akan semakin kompleks. Isi laporan keuangan yang kompleks dapat menyebabkan pembaca laporan keuangan tersebut sulit untuk membaca dan memahami maksud sebenarnya dari informasi yang disajikan dalam bagian tersebut. Nguyen (2021) menyatakan bahwa semakin kompleks laporan keuangan perusahaan maka kemungkinan *Tax Avoidance* dapat terdeteksi oleh otoritas pajak semakin kecil.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat *Tax Avoidance* dapat mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Penelitian Inger *et al.*, (2018) mengenai pengaruh *Tax Avoidance* terhadap pengungkapan informasi pada CALK khusus perpajakan menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *Tax Avoidance* yang tinggi akan membuat laporan keuangan yang sulit dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian Inger *et al.*, (2018) secara khusus meneliti keterbacaan dari CALK khusus perpajakan yang dilihat dari informasi tekstual (kualitatif) yang diungkapkan perusahaan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa semakin kompleks informasi kualitatif yang terdapat dalam CALK khusus perpajakan maka tingkat *Tax Avoidance* semakin tinggi. Kompleksitas informasi kualitatif yang diungkapkan akan membuat CALK khusus perpajakan semakin sulit untuk dibaca sehingga menyamakan tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* dapat mempengaruhi pengungkapan informasi kualitatif dalam CALK khusus perpajakan.

Penelitian Liu (2021) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajak memiliki proporsi data kuantitatif yang lebih sedikit pada CALK khusus perpajakan. Liu (2021) menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengurangi pengungkapan informasi kuantitatif untuk menghindari pemeriksaan pajak karena informasi kuantitatif merupakan informasi yang mudah untuk diukur. Perusahaan akan berusaha mengurangi proporsi informasi kuantitatif yang diungkapkan dalam CALK khusus perpajakan agar tindakan pengelolaan beban pajak yang dilakukan sulit terdeteksi oleh otoritas

pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat mempengaruhi pengungkapan informasi kuantitatif dalam CALK khusus perpajakan.

Pajak yang termuat dalam CALK khusus perpajakan salah satunya adalah pajak penghasilan. Setiap perusahaan pasti beroperasi untuk mendapatkan profit, dimana dengan semakin besarnya laba yang didapatkan perusahaan maka semakin besar pula pajak yang akan dibayar. Menurut Masdi (2021), realisasi Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2020 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan realisasi jenis pajak yang lain. Satria (2021), menyatakan bahwa pendapatan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Berdasarkan pernyataan tersebut, jumlah pajak penghasilan yang dibayar akan bergantung dari besar kecilnya pendapatan itu sendiri. Maka dari itu, pengenaan pajak penghasilan akan mempengaruhi laba dari perusahaan karena pendapatan merupakan dasar perhitungan pajak penghasilan. Menurut Patimah (2017), laba adalah perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisasi yang dihasilkan dari transaksi dalam suatu periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya. Laba yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak yang sebelumnya sudah dikurangi oleh beban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* yang artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *Tax Avoidance* suatu

perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Perusahaan akan lebih cenderung melakukan tindakan *Tax Avoidance* semakin besar laba yang dihasilkan karena perusahaan ingin mengurangi beban yang mempengaruhi keuntungan mereka. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Terdapat kemungkinan bahwa suatu perusahaan akan melakukan *Tax Avoidance* dengan memanipulasi laporan keuangan atau tidak sepenuhnya mengungkapkan informasi pada CALK khusus perpajakan seperti hasil yang sudah didapatkan pada penelitian-penelitian sebelumnya (Inger *et al.*, 2018; Liu, 2021). Perusahaan bisa meningkatkan laba dengan memanipulasi pengungkapan informasi pada CALK khusus perpajakan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah.

Menurut Tax Justice Network (2020) pada laporan yang berjudul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*", Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Kerugian tersebut disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak Badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan Wajib Pajak Badan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sisanya, berasal dari Wajib Pajak Pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Dalam laporan tersebut

dijelaskan bahwa perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut membuat keuntungan yang dilaporkan lebih sedikit dan perusahaan pada akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kementerian Keuangan telah menentukan target penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun sehingga estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Adapun juga target penerimaan pajak yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun sehingga estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,5 persen dari target akhir 2021. Dalam laporan “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*” juga disampaikan bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang mengalami kerugian terbesar akibat kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak mendapatkan peringkat keempat se-Asia setelah Cina, India, dan Jepang. Hal ini membuktikan bahwa *Tax Avoidance* memiliki dampak yang signifikan akan penerimaan pajak negara.

Penelitian yang meneliti pengaruh *Tax Avoidance* terhadap keterbacaan laporan keuangan telah dilakukan oleh Nguyen (2021) di New Zealand. Penelitian yang meneliti pengaruh *Tax Avoidance* terhadap keterbacaan CALK khusus perpajakan telah dilakukan oleh Inger *et al.*, (2018) di Amerika. Penelitian yang meneliti pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) di Indonesia. Penelitian yang meneliti pengaruh profitabilitas terhadap jumlah pengungkapan informasi kualitatif pada laporan keuangan telah dilakukan oleh Nustini dan Nuraini (2022) di Indonesia. Sejauh

yang diketahui, belum ditemukan adanya penelitian tentang pengungkapan informasi pada CALK khusus perpajakan di Indonesia, dan juga penelitian ini meneliti pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif pada CALK khusus perpajakan yang sebelumnya hanya meneliti salah satu dari dua jenis informasi tersebut dengan harapan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pengungkapan informasi pada CALK khusus perpajakan yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif karena penelitian yang membandingkan kedua jenis informasi tersebut masih belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga secara spesifik meneliti pengaruh laba terhadap pengungkapan informasi pada CALK khusus perpajakan melalui *Tax Avoidance* dimana dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah ditemukan adanya hubungan antara ketiga variabel tersebut secara terpisah namun belum pernah diuji pengaruhnya secara bersamaan.

Penelitian ini perlu untuk dilakukan mengingat perlunya transparansi perpajakan untuk dapat menekan tingkat *Tax Avoidance*. Salah satu bentuk transparansi perpajakan adalah pengungkapan perhitungan pajak yang lengkap dan jelas di depan publik melalui laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Penelitian ini akan meneliti pada level korporasi, dengan pertimbangan bahwa kerugian rupiah terbesar dari penghindaran pajak disebabkan oleh korporasi dan korporasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melakukan pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif pada laporan keuangan sehingga

akses informasi untuk penelitian ini dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 karena beberapa hal, yaitu perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain, dan menurut Kementerian Keuangan (2022), perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan juga menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak sebesar 29,1% pada Februari 2022. Maka dari itu, penelitian yang berjudul Pengaruh Laba terhadap Pengungkapan Informasi Perpajakan melalui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia perlu untuk dilakukan.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021. Penelitian ini akan menganalisis Pengaruh Laba terhadap Pengungkapan Informasi Perpajakan melalui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Indikator Laba diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Indikator dari *Tax Avoidance* adalah *Cash ETR* (CETR). Indikator untuk Pengungkapan Informasi Kualitatif diukur dengan tingkat keterbacaan dari informasi kualitatif yang diungkapkan dalam CALK khusus perpajakan menggunakan *Gunning Fog Index*. Indikator

Pengungkapan Informasi Kuantitatif diukur dengan melihat proporsi informasi kuantitatif pada CALK khusus perpajakan menggunakan *num_ratio*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi kualitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
- 2) Apakah laba berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi kuantitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
- 3) Apakah laba berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia?
- 4) Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi kualitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
- 5) Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi kuantitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
- 6) Apakah laba berpengaruh terhadap pengungkapan informasi kualitatif perpajakan CALK melalui *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

- 7) Apakah laba berpengaruh terhadap pengungkapan informasi kuantitatif perpajakan CALK melalui *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusunlah tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif laba terhadap pengungkapan informasi kualitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif laba terhadap pengungkapan informasi kuantitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif laba terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia.
- 4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *Tax Avoidance* terhadap pengungkapan informasi kualitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
- 5) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif *Tax Avoidance* terhadap pengungkapan informasi kuantitatif perpajakan CALK pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

- 6) Mengetahui dan menganalisis pengaruh laba terhadap pengungkapan informasi kualitatif perpajakan CALK melalui *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
- 7) Mengetahui dan menganalisis pengaruh laba terhadap pengungkapan informasi kuantitatif perpajakan CALK melalui *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diberikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Terdapat beberapa manfaat teoritis yang didapatkan terkait dengan penelitian:

- 1) Penelitian ini menambah pengetahuan dalam bidang Akuntansi Keuangan, yaitu pada informasi keuangan dan juga dalam bidang Akuntansi Perpajakan khususnya Transparansi Perpajakan.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Empiris

Terdapat manfaat empiris yang didapatkan dari penelitian ini untuk beberapa pihak:

- 1) Bagi Otoritas Pajak, informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada otoritas pajak untuk bekerja sama dengan Bapepam dalam membuat kebijakan untuk mendukung transparansi perpajakan di Indonesia. Kebijakan tersebut dapat berupa standarisasi pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif pajak. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada otoritas pajak untuk bekerja sama dengan Bapepam dalam membuat kebijakan mencegah *Tax Avoidance*, dimana nantinya bisa dilakukan dengan memberi perhatian kepada perusahaan dengan laba yang besar.
- 2) Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor terkait pengambilan keputusan, karena sebelum memutuskan untuk berinvestasi setiap investor pastinya ingin mengetahui apakah perusahaan sudah mengikuti peraturan yang berlaku dimana hal itu dilakukan untuk menghindari resiko kerugian yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan yang bisa muncul di waktu yang akan datang.
- 3) Bagi Kreditur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para kreditur terkait kebenaran informasi mengenai laba dan pajak perusahaan. Hal ini dilakukan karena kedua hal tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar utang mereka.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian Pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bagian Tinjauan Pustaka dijelaskan mengenai landasan teori, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian Metode Penelitian dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode atau teknik pengumpulan data, definisi operasional serta pengukuran variabel dari penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian Analisis Data dan Pembahasan dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan uji regresi linear berganda serta pembahasan mendalam mengenai hipotesis-hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bagian Kesimpulan dijelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, serta rekomendasi dari hasil penelitian ini.

